

**PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Analisis Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kecamatan
Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016- 2017)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial (S.Sos),
Jurusan Ilmu Politik Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

WAHYUNI

NIM: 30600113093

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Analisis Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kecamatan
Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016- 2017)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial (S.Sos),
Jurusan Ilmu Politik Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

WAHYUNI

NIM: 30600113093

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni
Nim : 30600113093
Tempat/Tgl. Lahir : Sumarang, 31 Desember 1994
Jurusan/Prodi : IlmuPolitik
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat, danPolitik
Judul Skripsi : Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2017).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya/penelitian sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan penguji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata, 30 Agustus 2017

Yang menyatakan


WAHYUNI
NIM:30600113093

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “PEMBANGUNAN DAN KESEJATERAAN MASAYARAKAT (Analisis Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Tahun 2016-2017).”, yang disusun oleh Wahyuni, Nim: 30600113093, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2017, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos), dengan beberapa perbaikan.

Samata Gowa, Oktober 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr. H. Mahmuddin, S.Ag., M.Ag	(.....)
Sekretaris	:	Syahrir Karim, S.Ag., M.Si., Ph.D	(.....)
Munaqisy I	:	Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si	(.....)
Munaqisy II	:	Drs. H. Ibrahim, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. Tasmin Tangngareng, M. Ag	(.....)
Pembimbing II:	:	Syahrir Karim, S. Ag., M.Si., Ph.D	(.....)

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA.

NIP. 19590704 198903 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin., *Asshalatu Wassalamu'ala Rasulillah Amma Ba'du*. Segala puji bagi Allah 'Azza wa Jalla atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada penulis. Selesainya skripsi ini adalah salah satu nikmat yang Allah 'Azza wa Jalla karuniakan diantara milyaran nikmat yang telah Allah 'Azza wa Jalla hadiahkan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam, tauladan terbaik umat manusia yang Allah „Azza wa Jalla ciptakan dengan segala kesempurnaan aqidahnya, keindahan akhlaknya dan juga fisiknya. Dengan mempelajari perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam maka kelirulah seseorang yang mengatakan “no body perfect”. Karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam datang dengan sempurna dari segala aspek, tidak membutuhkan makhluk untuk menyempurnakan atau mengaturnya, sebab syari“at tersebut datang dari sisi Allah 'Azza wa Jalla.

Skripsi ini berjudul “PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Analisis Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kecamatan Camapalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2017)”. Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial prodi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin Filasafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Uin Alauddin Makassar

Penulis juga menyadari akan bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak dalam kehidupan penulis sampai saat ini. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada Bapak, Ibu, Adik, dan Nenek tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, nasehat, pengalaman dan curahan hati yang tidak bisa digantikan dengan materi apapun. Tak lupa pula penulis hanturkan doa kepada Pamanku tercinta Abdul Rahman (Alm) semoga mendapatkan tempat yang paling terindah disisi Allah swt Amin. Serta terimakasih kepada seluruh keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan, semangat, serta doa dan mau mendengarkan keluh kesah dalam kehidupan sehari-hari dan terutama selama masa penyusunan skripsi penulis, khususnya Sahabat-sahabatku: Maryani, Hasmiati, Winhasty, St. Hardianti, Andi Ruhmiati, Nurtakawa dan Siti, terimakasih karena telah menjadi sahabatku.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA selaku Dekan dan selaku pembimbing I, beserta Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. Tasmin, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Bapak Syahrir Karim, S.Ag, M.Si. Ph.D selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian studi.
6. Teman-teman Jurusan Ilmu Politik angkatan 2013 tanpa terkecuali namun terkhusus dan terspesial kepada Ilmu Politik kelompok 5/6 (Irsang, Paisal, Maulana, Padli, Hardianty, Nhasty, Rahmi, Ruhmi, Rabiatal, Aswan, Ibnu, Alfian, Zulfikar, Ilham, Maskur, Agung, Asdar, Sahid, Riyan, Nur Takwa, Khotija, Nirwana, Eka, Ananda. Yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini).
7. Teman-teman KKN angkatan 53 Kec. Tinggimoncong khususnya teman seposko Desa Parigi (Amin Rais, Amri Azhari, Amrullah, Nur Naafila Nurdin, Nur Anny Rauf dan Sariama). Terimakasih atas dukungan, semangat, dan candaan yang selalu diberikan kepada penulis.

Namun, demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritikan dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang. Semoga Allah swt. senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan limpahan karunia-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Samata, 25 Mei 2017

Penulis

WAHYUNI
NIM:30600113093



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL`	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR BAGAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Karya Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Teoritik dan Konseptual	
1. Teori Birokrasi dan <i>Good Governance</i>	14
2. Otonomi Desa	16
B. Kerangka Konseptual	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Lokasi Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Metode Pengumpulan Data	23
D. Jenis Data	26
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
1. Sejarah Desa Sumarang.....	28
2. Kondisi Umum Desa (Demografi)	30
3. Keadaan Sosial Budaya.....	32
4. Keadaan Ekonomi	33
5. Kondisi Pemerintahan Desa	34
B. Kesiapan Perangkat Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa	
1. Kesiapan Organisasi.....	38
2. Kesiapan Sumber Daya Manusia	50
3. Kesiapan Sarana dan Prasarana.....	54
C. Dampak Sosial dan Ekonomi pengalokasian dana desa dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa	
1. Sosial	
a. Dampak pada organisasi	56
b. Dampak pada Sumber Daya Manusia	58

2. Ekonomi	
a. Dampak pada kesiapan Sarana dan Prasarana	61
b. Dampak pada Pendapatan Desa	64

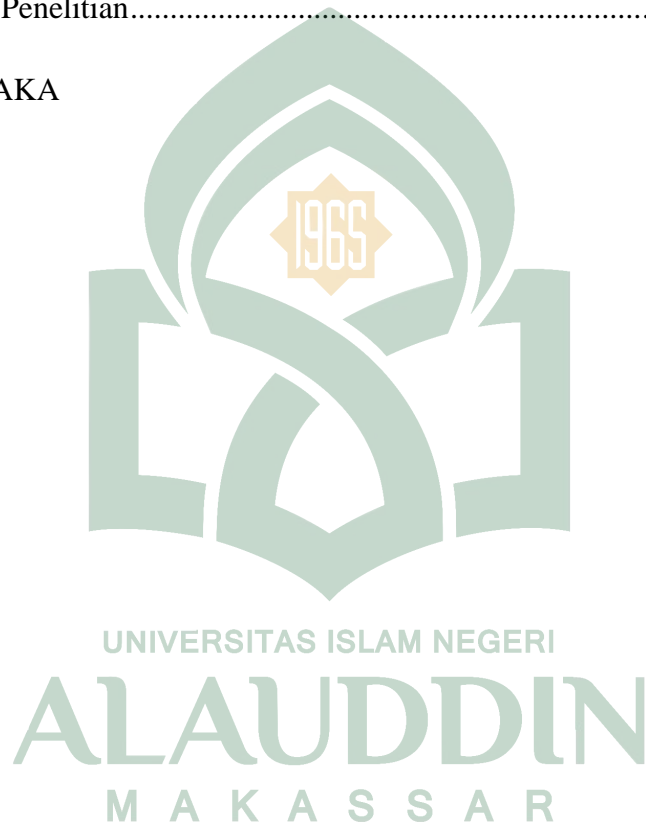
BAB V PENUTUP

D. Kesimpulan	67
E. Implikasi Penelitian.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DATA DIRI



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan	25
Tabel 4.1 Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa.....	31
Tabel 4.2 Proporsi Mata Pencaharian Penduduk Masyarakat Desa Sumarrang	33
Tabel 4.3 Periode Kepala Desa Sumarrang.....	34
Tabel 4.4 pendapatan transfer desa sumarrang pada tahun 2017	37
Tabel 4.5 klasifikasi Sumber Daya Manusia (perangkat desa)	39
Tabel 4.6 Nama anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumarrang	40
Tabel 4.7 Data kelembagaan / organisasi yang ada di Desa Sumarrang.....	41
Tabel 4.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumarrang Tahun 2017	45
Tabel 4.9 Tingkat pendidikan aparat pemerintah Desa Sumarrang	50
Tabel 4.10 Tingkat partisipasi masyarakat.....	52
Tabel 4.11 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sumarrang	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Adat budaya	30
------------------------------	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka konseptual.....	19
Bagan 4.1 Struktur pemerintahan Desa Sumarrang	35
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa.....	36



ABSTRAK

Nama : Wahyuni
Nim : 30600113093
Judul : Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2017).

Skripsi ini mengkaji tentang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat analisis terhadap alokasi dana desa di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tahun 2016-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan perangkat pemerintahan desa dalam mengelola dana desa dan dampak sosial ekonomi pengalokasian dana desa dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan beberapa teori yaitu: teori demokrasi dan *good governance* dan otonomi desa.

Hasil penelitian ini adalah kesiapan perangkat pemerintahan desa dalam mengelola dana desa dari segi kesiapan organisasi dan sumber daya manusia serta kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa belum bisa dikatakan siap sepenuhnya melihat sebagian besar aparat pemerintahan desa itu tidak bekerja sesuai dengan bidang dan keahliannya. Selain itu Pengalokasian dana desa memberikan dampak pada sisi sosial dan sisi ekonomi, pada sisi sosial yaitu pada kesiapan organisasi (LKMD, PKK, dan KT) belum memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pada sisi ekonomi yaitu kesiapan sarana dan prasarana serta pendapatan desa belum memberikan kontribusi yang berarti pula dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa Sumarrang. mengingat alokasi dana desa mestinya tidak hanya monoton pada sektor pembangunan, meskipun pembangunan juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dikarenakan akses menjadi mudah, namun tetap saja sektor lain mesti mendapat porsi anggaran yang berimbang.

Implikasi dari penelitian ini ialah *Good Governance* tidak dapat diaplikasikan dengan baik dalam suatu lingkup masyarakat tanpa adanya kesiapan organisasi, kesiapan sumber daya manusia serta kesiapan sarana dan prasarana yang memadai. Apabila ketiga konsep tersebut sudah ada dan dianggap memadai maka dana desa dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Aparat pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan skala skala prioritas agar kesejahteraan itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Dana Desa, *Good Governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Fenomena yang sangat substansial yang dihadapi masyarakat Indonesia di dalam era reformasi sangat terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik yang tentunya yang sangat berkompeten adalah birokrasi yakni masalah korupsi yang sudah merajalela, hampir semua pekerja pemerintah yang tentunya harus menjadi prioritas dalam penanganannya dalam membawa masyarakat menjadi semakin sejahterah sebagai amanah kemerdekaan.¹

Melihat permasalahan birokrasi, ketidak mampuan birokrasi ini lebih disebabkan oleh birokrasi berada dan bekerja pada lingkungan yang hirarkis, birokratis, monopoli dan terikat oleh political authority. Keadaan ini membuat birokrasi menjadi membudaya yang kaku, ada dilingkungan yang hanya sebatas mengikuti perintah. Dan juga dikarenakan ada didalam tightening control, maka birokrasi menjadi tidak memiliki inisiatif dan kreatifitas. Birokrasi sangat sarat dengan banyak tugas dan fungsi karena tidak saja terfokus kepada pelayanan publik tapi juga bertugas dan berfungsi sebagai motor pembangunan dan aktifitas pemberdayaan. Akibatnya adalah menjadikan birokrasi sebagai lembaga yang sangat tambun sehingga mengurangi kelincahannya. Kenyataan ini perlu disikapi untuk melakukan pembenahan dan pengembalian fungsi birokrasi kepada konsep, makna,

¹Muhammad Ramli, *Dinamika Birokrasi pada Era Reformasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012). h.193

prinsip yang sebenarnya. Dalam rangka ini dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam birokrasi pemerintahan dengan meningkatkan kerjasama untuk pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Negara Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.²

Desentralisasi bukan merupakan pilihan yang mudah bagi Indonesia. Dengan wilayah geografis yang sangat luas yang terurai dalam puluhan ribu pulau, serta masyarakat yang sangat heterogen, desentralisasi memang seringkali menjadi dilema. Apresiasi terhadap keberagaman menuntut sentralisasi yang pada gilirannya melahirkan otonomi daerah. Penghargaan ini bisa menghasilkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional. Oleh karena itu, Negara Indonesia memulai perjalanannya dengan pilihan pemerintahan yang desentralistik.³

Namun, tatkala desentralisasi melahirkan otonomi yang membuat pusat kehilangan kendali, maka desentralisasi juga sering dianggap sebagai sumber masalah. Inilah kurang lebih interpretasi yang dikembangkan oleh pemerintahan orde baru yang menjadi basis bagi terbangunnya pemerintahan yang sentralistik.⁴

² Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). h.1.

³ Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h.33.

⁴ Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* , h.33-34.

Pandangan agama Islam terhadap sistem pemerintahan dimenejemenkan secara baik sesuai tuntutan yang telah ditentukan dalam Al-quran sesuai firman Allah swt dalam Q.S Al-Nisa/4 : 80 yang berbunyi:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.⁵

Penjelasan ayat diatas bahwasanya manajemen pemerintah yang baik dalam mengelola masyarakat perlu adanya penetapan sebuah peraturan pemerintah yang baik dan ditaati oleh rakyat. Perlu diingat juga bahwa dalam pandangan Islam tidak diturunkan oleh Allah swt kepada manusia hanya untuk mengatur masalah pribadi manusia tetapi juga sebuah masalah sosialnya. Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan.

Pemerintah sebagai pemimpin yang berhak mengatur masyarakatnya, hendaklah dipatuhi. Adanya perintah untuk mematuhi pemerintah sebagai pemimpin dijelaskan oleh hadis Nabi:

⁵ Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemehannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), h.91

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبُّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

*Diriwayatkan dari Ibnu Umar katanya: Nabi telah bersabda: “Wajib atas setiap muslim mendengar serta taat kepada perintah pemimpin dia suka atau tidak kecuali dia diperintahkan supaya melakukan maksiat. Sekiranya dia diperintahkan supaya melakukan maksiat maka janganlah dia dengar dan mentaatinya.”*⁶

Sejarah perjalanan tata pemerintahan desa selama ini berubah-ubah seiring dengan kondisi dan politik nasional. Reformasi pemerintahan desa dimaksud untuk memperbaharui dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa.⁷

Menurut ketentuan PP 60 Tahun 2014, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa.⁸

Sejahtera lahir dan batin harus terwujud dalam setiap individu yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera. Bahasan kesejahteraan akan dibatasi “lebih kepada aspek pembangunan ekonomi”. Demikian pula ayat-ayat Al-Quran yang terkait secara

⁶Hendra S. *Sahih Bukhari dan Muslim*. (Bandung: Jabal, 2008), h.344

⁷Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). h.7

⁸http://www.djpk.depkeu.go.id/Penggunaan-Dana-Desa_Kemendes.pdf. Diakses pada Jum'at 17 Maret 2017. Pukul 16:16

langsung dengan konsep kesejahteraan dibatasi pada usaha/ bekerja, sebagai titik tolak pemilihan ayat yang akan dibahas. QS. Al- Taubah/9:105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*⁹

Berangkat dari harapan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya desa maka kiranya penting bagi kita bersama untuk mencermati sistem penyusunan anggaran yaitu sistem anggaran tradisional, sistem anggaran kinerja dan *Planning Progame And Budgeting Sistem* (PPBS). Dalam keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata penyusunan APBD dalam rangka desentralisasi otonomi daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan APBD, standarisasi sistem anggaran daerah yang diwajibkan bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang berada menggunakan standarisasi tersebut sebagai bentuk *compliance* terhadap regulasi pemerintahan RI.¹⁰

⁹Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemehannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), h.203

¹⁰Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, graha ilmu, (Yogyakarta, 2006), h. 89-90

Anggaran daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang kuat, nyata dan bertanggung jawab. APBD yang merupakan perangkat ekonomis dari pendapatan dan belanja daerah, merupakan gambaran tentang arah dan tujuan dan pembangunan di daerah dalam kurun satu tahun anggaran. Sebagai sebuah kebijakan politik, APBD harus disusun secara responsif, transparan dan akuntabel. Demikian juga dalam pengelolaan alokasi dana desa atau ADD. ADD adalah sebagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Ada banyak prestasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun pada sisi yang lain masih terdapat juga sejumlah masalah publik yang belum bisa tertangani secara tuntas. Setiap kali kita menuju tahun anggaran yang baru tentunya kita berharap bahwa anggaran pemerintah akan lebih signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaannya, ADD harus dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, efisien dan merata. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui alokasi dana desa yang dikisarkan mencapai 1,4 milyar/tahun/desa. Maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Sebelum adanya perubahan perundang-undangan ADD tidak termasuk kedalam APBN, namun karena adanya perubahan perundang-undangan, ADD dimasukkan kedalam APBN dan hal ini dilakukan dengan harapan dapat membangun desa

menjadi lebih baik. Berbicara mengenai anggaran memang merupakan hal yang sangat sensitif, dan tidaklah mudah membahas mengenai hal duniawi karena ditakutkan akibat di akherat kelas seperti yang dijelaskan dalam hadis shahih Bukhari Muslim telah diriwayatkan:

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

Diriwayatkan dari Ummu Salamah katanya: Rasulullah bersabda: Sekiranya kamu berkelahi di hadapanku. Bisa jadi sebagian dari kamu lebih pandai mengemukakan alasannya dari yang lain, maka aku akan memutuskan menurut apa yang telah aku dengar. Oleh sebab itu, siapa yang telah aku berikan sebagian dari hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya. Karena sesungguhnya apa yang aku berikan kepadanya itu, tidak lain hanyalah sepotong api Neraka.¹¹

Dalam penelitian ini penulis mengangkat studi tentang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2017) yang merupakan salah satu desa yang cukup luas yang ada di wilayah Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

¹¹Hendra S. *Sahih Bukhari dan Muslim*. (Bandung: Jabal, 2008), h.309.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

a. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2017).

b. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul di atas, dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan, dari segi tentang Analisis terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:

- a. Bahwa pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, dimana pembangunan menekankan pemenuhan pokok dan hak asasi manusia.¹² Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi.
- b. Bahwa sejahterah menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, serta jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terpenuhi.

¹² Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.

- c. Masyarakat sekelompok orang yang merasakan dampak dari pembangunan yang ada dalam desa tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana bentuk kesiapan perangkat pemerintah desa dalam mengelola dana desa?
2. Bagaimana dampak sosial ekonomi pengalokasian dana desa dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum dalam suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan penelitian. Begitupun penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2017) menjadi suatu keinginan peneliti untuk meneliti dan mengkaji dengan tujuan dan kegunaan:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui kesiapan perangkat pemerintahan desa dalam mengelola dana desa.
 - b. Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi pengalokasian dana desa dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Manfaat

- a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah desa Sumarang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar mengenai tata kelola dan kesiapan parat pemerintah desa dalam mengelola dana desa.
- b. Sebagai bahan penelitian selanjutnya, dengan objek yang relevan.

E. Tinjauan Karya Terdahulu

Tujuan utama tinjauan karya terdahulu dalam penelitian kualitatif adalah untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca diantaranya:

1. Skripsi karya Cornelius Complek Caro (2015) yang berjudul "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Peronkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*", yang hasilnya menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa peronkan sudah cukup baik. Dikatakan cukup baik karena dilihat dari perencanaan sudah dilakukan perumusan kebijakan pada pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa. Pada pengorganisasian masing-masing pegawai sudah ditempatkan pada kemampuan mereka masing-masing. Pada pergerakan sudah baik karena masing-masing aparatur sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur desa, pada pengawasan masih

kurang baik karena dalam pelaksanaan pembangunan desa jarang dilihat oleh pihak badan permusyawaratan desa dan pihak pemerintah desa.¹³

2. Skripsi karya Sudarni (2014) yang berjudul “*Politik Anggaran dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*” yang hasilnya menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan anggaran dan respon masyarakat terhadap implementasi pembangunan infrastruktur di desa bululoe berasal dari APBDes kemudian dilanjutkan perencanaan penganggaran kegiatan melalui RKPDes untuk selanjutnya dimusyawarahkan dalam musrembang, setelahnya disalurkan ketiap-tiap dusun. Namun, dalam prosesnya pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Bululoe tidak berjalan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini karena adanya kepentingan elite politik dalam proses pengalokasian anggaran, belum lagi banyaknya pungutan yang membebani masyarakat. Selanjutnya mengenai respon masyarakat terkait implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Bululoe, sebagian masyarakat masih belum puas karena beberapa program pembangunan khususnya perbaikan infrastruktur hingga saat ini belum terealisasi.¹⁴

3. Skripsi karya Nova Sulastri (2016) yang berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa*

¹³Cornelius Complek Caro, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Peronkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*”, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015).

¹⁴Sudarni, “*Politik Anggaran dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*,”*Skripsi*”(Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2014).

Lakapodo Kecamatan Watapute Kabupaten Muna” yang hasilnya menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana di Desa Lakapodo ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian ini, tahap perencanaan dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksana Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat.¹⁵

4. Skripsi karya Dede Ardian (2014) yang berjudul *“Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti”* yang hasilnya menyimpulkan bahwa penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa, perakteknya masih terdapatnya kelemahan dalam menjalankan, pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa itu sendiri. Sehingga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal dan dengan hasil yang kurang memuaskan.¹⁶

¹⁵ Nova Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watapute Kabupaten Muna”, *“Skripsi”*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, 2016).

¹⁶ Dede Ardian, “Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti”, *“Skripsi”*, (Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

5. Skripsi karya M. Luqman Hakim (2012) yang berjudul “*Politik Anggaran Keuangan Desa (Studi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 2011 Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)*” yang hasilnya menyimpulkan bahwa politik anggaran dalam pengelolaan ADD di Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan secara umum dilihat dari segi perimbangan kebijakan anggaran ADD berbeda pada setiap desa, hal ini dilihat dari permasalahan- permasalahan skala desa berbeda dengan desa lainnya. Alokasi dana desa pada tahap perencanaannya hampir selalu dipilihkan dari atas ke bawah dan pelaksanaannya sering kali melalui mekanisme proyek.¹⁷

Hasil penelitian di atas berbeda dengan yang akan disusun oleh penulis karena penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada tata kelola dana desa dan implikasinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar seperti dalam hal kesiapan perangkat pemerintah desa dalam mengelolah dana desa dan dampak nyata pengalokasian dana desa tersebut.

¹⁷M. Luqman Hakim, “Politik Anggaran Keuangan Desa (Studi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 2011 Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)”, (*Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2012).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teoritik dan Konseptual

Melihat dari judul penelitian yaitu “Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis terhadap alokasi dan desa di desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016-2017)”. Maka peneliti menggunakan beberapa teori-teori ilmiah sebagai berikut:

1. Teori Birokrasi dan *Good Governance*

Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik. Sangatlah disayangkan apabila kerja rutinitas aparat birokrasi statis dan kurang peka terhadap perubahan lingkungan bahkan terkesan cenderung resisten terhadap pembaruan. Kondisi seperti ini seringkali memunculkan potensi praktek mal-administrasi yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bermula dari kondisi tersebut maka pemerintahan pusat maupun daerah perlu sangat melakukan reformasi birokrasi yang tidak hanya pada tataran komitmen saja tetapi juga disandingkan dalam tataran kehidupan nyata.¹⁷

Seperti yang dikemukakan oleh Max Weber, seorang Sosiolog Jerman menulis sebuah alasan yang menggambarkan bentuk birokrasi sebagai cara ideal mengatur organisasi pemerintahan melalui prinsip-prinsip bentuk birokrasi antara lain harus

¹⁷Pramusinto, Agus dan Agus Purwanto, Erwan, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009),h.110.

terdapat adanya struktur hirarkis formal pada setiap tingkat dan dibawah kontrol dan dikendalikan dalam sebuah hirarki formal atas dari perencanaan pusat dan pengambilan keputusan, manajemen dengan aturan yang jelas adanya pengendalian melalui aturan yang memungkinkan agar keputusan yang dibuat pada tingkat atas dapat dilaksanakan secara konsiten oleh semua tingkat dibawahnya.¹⁸

Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.¹⁹

Dari segi fungsional, aspek: *Governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi. *Governance* menurut definisi dari *World Bank* adalah “ *The way state power is used in managing economic and social resources for development*

¹⁸Max Weber , *The Theory Of Social Economics and Organization* (London: Collier Macmillan Publisher, 1947),h.102.

¹⁹Sedarmayanti, *GOOD GOVERNANCE “Kepemerintahan yang baik”* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 4.

and society”. Sementara UNDPN mendefenisikan sebagai “ *The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”.

Berdasarkan definisi terakhir ini, *Governance* mempunyai tiga kaki (*Three Legs*), yaitu:

- a. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity, poverty* dan *quality of live*.
- b. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
- c. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Oleh karena itu, institusi dari *Governance* meliputi tiga domain, yaitu *State* (Negara atau Pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.²⁰

2. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.²¹

²⁰Sedarmayanti, *GOOD GOVERNANCE “Kepemerintahan yang baik”* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 5.

²¹Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) h.165.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Penagawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan badan perwakilan desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi diantara warganya.

Dengan demikian, diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan transisi dari desa seragam yang diciptakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan sekaligus memberi landasan yang kuat bagi terwujudnya “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah akan tetapi justru sebaliknya desa merupakan “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri.²²

²²Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomiyang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) ,h.166.

Namun harus selalu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa, jangan dilakukan secara kebablasan sehingga desa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun dengan pemerintah pusat, bertindak semau sendiri dan membuat peraturan desa tanpa memerhatikan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

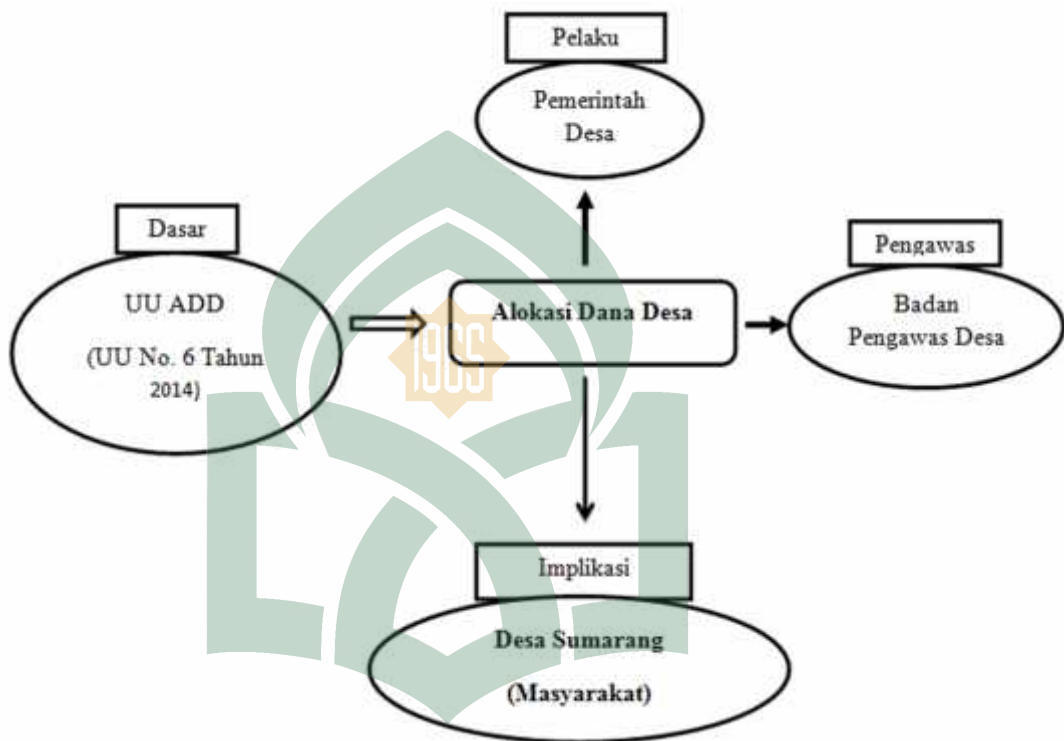
Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Konstruksi perwilayahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan provinsi sebagai wilayah administratif sekaligus pula sebagai daerah otonom.

Peraturan demikian menunjukkan adanya keterkaitan antara pemerintah provinsi dan daerah-daerah otonom dalam wilayahnya yaitu kabupaten, kota dan desa, baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur

penyelenggaraan pemerintahan, karena penyusunan kabupaten, kota dan desa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diikat oleh wilayah provinsi.²³

B. *Kerangka Konseptual*



Dalam UU 6/2014 tentang Desa terdapat beberapa poin diantaranya: PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN dan PP 22/2015 tentang Perub PP 60/2014, yang membahas mengenai: mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.

²³Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomiyang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) ,h.167.

Ketentuan PP 60 Tahun 2014:

1. Pasal 19

- a. Dana Desa digunakan untuk membiayai peneyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- b. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipreoritakan untuk pembangunan dan pemberdsayaan masayarakat.

2. Pasal 20

Pembangunan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan menteri desa tentang prioritas penggunaan dana desa tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan PBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.²⁴

Pemerintah desa adalah kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. dari pengertian di atas, kita simpulkan bahwa yang termasuk pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa (sekretaris desa, kaur, kepala dusun).

²⁴http://www.djpk.depkeu.go.id/Penggunaan-Dana-Desa_Kemendes.pdf. Diakses pada Jum'at, 17 Maret 2017. Pukul 16:16.

Badan Permusyawaratan Desa juga termasuk unsur penyelenggara pemerintahan desa. Maka, pemerintahan desa = pemerintahan desa + BPD. Kehadiran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga perwakilan desa secara formal memang melahirkan harapan baru demokrasi desa. masyarakat sangat berharap BPD menjadi lokomotif baru demokrasi desa yaitu sebagai sarana artikulasi, aspirasi, dan partisipasi, serta alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa. namun tidak jarang kehadiran BPD ini menimbulkan masalah baru ditingkat desa. terutama dalam kaitan relasi yang dibangun antara kepala desa dengan BPD. Dari sisi kepala desa, ada kepala desa yang tidak mau berbagi kekuasaan dengan BPD, ada kepala desa yang merasa takut kontrol yang dilakukan BPD akan merecoki kinerjanya, dan ada pula kepala desa yang berpandangan bahwa kekuasaan itu harus tunggal.²⁵



²⁵Linda Muchacha Paramitha dkk, “Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.4, h.92.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana lebih menekankan pada tiga aspek penting, *pertama*, pada unit analisis mikro dimana satuan yang diteliti dibatasi sedemikian rupa sehingga lebih dapat dijelaskan secara terperinci; *kedua*, penelitian bersifat holistic dalam arti melihat objek yang diteliti secara menyeluruh di dalam satu kesatuan. Suatu fenomena disini dilihat sebagai suatu kesatuan (*wholeness*) dari sebuah proses sosial budaya; *ketiga*, penelitian kualitatif cenderung menekankan perbandingan sebagai salah satu kekuatan karena perbandingan ini juga membuat penelitian kualitatif dapat menekankan proses dan dapat menegaskan konteks sosial dimana suatu gejala itu muncul.²⁶

Dalam penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk memberi gambaran mengenai Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2016).

2. Lokasi Penelitian

Lokasipenelitianninitepatnya di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

²⁶Syamsuddin, dkk, *Pedoman PraktisMetodologi Penelitian Internal*.(Ponorogo: Cv. Wade Group, 2015), h. 13.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.²⁷

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Library research* yaitu cara pengumpulan data melalui buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi kata baik huruf maupun tanda bacanya.
 - b. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan dalam bentuk ikhtisarnya.²⁸
2. *Field research* yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan. Teknik

²⁷ Syamsuddin, dkk, *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal*, h.19.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 108.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga cara yakni wawancara, observasi dan dokumentasi:

- a. Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Jadi observasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.²⁹
- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.³⁰

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap

²⁹Burhan Bungin, *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 118.

³⁰Syamsuddin, dkk, *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal*, (Ponorogo: Cv. Wade Group, 2015), h. 57-58.

paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi sosial yang diteliti.³¹

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya yaitu:

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan

No	Nama	Pekerjaan
1	Jamaluddin	Kepala Desa
2	Kurniadi Ahmad	Sekretaris Desa
3	Sukurli Maduani	Ketua BPD
4	St. Hardianti	Bendahara Desa
5	Asmauddin	Kaur Umum
6	Abd. Majid	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan
7	Baharuddin	Kasi Pemerintahan
8	Nasaruddin	Kasi kemasyarakatan
9	Ahmad Syarif	Masyarakat Pemuda Desa Suamarrang
10	Arsyad	Masyarakat Pemuda Desa Suamarrang
11	Maslan Mahmud	Masyarakat Pemuda Desa Suamarrang
12	Nur Lina	Ketua Klp Tani Bina Remaja
13	Maryani	Pemuda
14	Rasamia	IRT sekaligus masyarakat petani Desa Sumarrang

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 218-219.

Informan dalam penelitian ini dipilih pertimbangan bahwa informan tersebut merupakan bagian dari masyarakat Desa Sumarrang, sehingga dapat memberikan informasi atau menjawab pertanyaan yang terkait dengan perumusan masalah dalam penelitian, yaitu: *Bagaimana kesiapan perangkat pemerintahan desa dalam mengelola dana desa, dan bagaimana dampak nyata pengalokasian dana desa dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.*

- c. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat peneliti, meliputi buku-buku yang relevan, pertauran-peraturan, laporan kegiatan film dokumenter dan data lain yang relevan.³²

D. Jenis Data

1. Data primer (*primary data*), yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.³³ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pemerintah desa sebagai tokoh utama dalam penelitian ini, kemudian diperkuat dengan jawaban-jawaban wawancara yang mendukung lainnya seperti tokoh pemuda desa dan masyarakat.
2. Data sekunder (*secondary data*), yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan

³²Syamsuddin, dkk, *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal*, (Ponorogo: Cv. Wade Group, 2015), h. 156.

³³Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29-30.

oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelola, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.³⁴ Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat dijadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, dan juga dari referensi buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.³⁵

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.³⁶

³⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 138.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 222.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Desa Sumarang

Desa Sumarrang lahir dan terbentuk melalui proses sejarah yang sangat panjang, dimana diawali dari suatu misi kerajaan Balanipa untuk menyerang kerajaan Passokkorang yang rajanya waktu itu sangat dzalim sampai suatu ketika tindakannya melukai hati raja Balanipa. Maka diadakanlah sayembara yang bertujuan untuk menaklukkan Raja Passokkorang, adapun bunyi sayembara tersebut adalah “Barangsiapa yang dapat membuktikan terbunuhnya Raja Passokkorang maka Raja Balanipa akan memberikan hadiah”. Dan salah satu diantara peserta yang ikut sayembara tersebut adalah “Tomakaka” (leluhur)³⁷.

Tomakaka yang memang ahli strategi berhasil memperdaya Raja Passokkorang dan berhasil membawa bukti autentik di hadapan Raja Balanipa bahwa Raja Passokkorang telah terbunuh serta merta berhasil membumi hanguskan kerajaan Pasokkorang.³⁸ Dari tragediitulah sebuah peristiwa sakral terjadi disalah satu kampung yang bernama “Lambelotong” yang tidak terlalu jauh dari wilayah kerajaan Passokkorang dimana penduduknya saat itu yang merupakan eksodus dari Mosso, Pallis, Tondo, Napo, Todang-Todang, Ma’dang, Samasundu dengan spontan berlarian menuju ke sebuah gunung untuk menyaksikan secara kasat mata apa yang terjadi di

³⁸ Data Desa Sumarrang tahun 2016.

bumi Pasokkorang karena awan yang berwarna merah hanya terlihat di wilayah kerajaan Passokkorang dan ternyata sangat jelas dari tempat itu bahwa kerajaan Passokkorang bangunannya telah rata dengan tanah akibat amukan si jago merah. Adapun tempat yang dimaksud tersebut adalah sebuah gunung yang bernama “Buttu Sumarrang”.

Pasca tragedi tersebut, atas inisiatif beberapa tokoh menyepakati nama gunung tersebut diabadikan sebagai nama salah satu kampung yaitu “Kampung Sumarrang” sehingga bertambah lagi satu nama kampung. Raja Balanipa pun memberikan hadiah tanah pemukiman dan pertanian kepada Tomakaka atas permintaan Tomakaka sendiri yang meliputi beberapa kampung termasuk Sumarrang sendiri. Oleh karena luasnya wilayah Pemerintahan Kerajaan Balanipa maka dibentuklah beberapa distrik yang bertujuan untuk membantu roda pemerintahan dan pada saat itu, dibentuk juga distrik wilayah pegunungan yang berkedudukan di Sumarrang dan kepala distriknya bergelar “Puang Tenggelang” yang daerah kekuasaannya meliputi daerah Sambali-bali, Pussui, Tenggelang, Todang-todang, Ma’dang, Mosso sebagian, Pallis, Tondo, Pendulangan dan Sumarrang sendiri, atau dengan kata lain distrik Tenggelang membawahi 27 Kepala Kampung.³⁹

Namun setelah lahir Undang-Undang yang mengatur tentang daerah otonom, dengan sendirinya semua distrik dibubarkan secara resmi oleh Pemerintah, lalu Sumarrang yang masih berstatus kampung setelah melalui pertimbangan yang matang

³⁹ Data Desa Suamarrang tahun 2016.

mengusulkan nama Sumarrang menjadi sebuah Desa, sehingga pada tahun 1967 secara definitif Desa Sumarrang resmi terbentuk dan secara peta normal masuk dalam wilayah Kecamatan Campalagian sampai saat ini.

2. Kondisi Umum Desa (Demografi)

Desa Sumarrang yang luasnya ± 20.100 Ha dengan kondisi alam daerah pegunungan, berada pada ketinggian ± 57 M di atas permukaan laut, ± 4 Km dari ibu kota kecamatan, ± 36 Km dari ibu kota Kabupaten dan ± 156 Km dari ibu kota Provinsi. Terdiri dari 7 Dusun yaitu Lambelotong, Pessunan, Rondongan, Puambuttu, Galung, Pummossi, Batusasi.⁴⁰ Dengan jumlah penduduk sampai pada tahun 2015 ± 5090 jiwa, rumah tangga ± 1368 kepala keluarga.

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tenggeling dan Desa Sambali wali Kecamatan Luyo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gattungan & Desa Lagi-Agi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ongko & Padang Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Todang-todang dan Desa Pendulangan Kecamatan Limboro.

⁴⁰ Data Desa Suamarrang tahun 2016.

Tabel 4.1: Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa di Desa Sumarrang Tahun 2016

No.	Nama Dusun	Penduduk (Jiwa)			Jumlah Rumah Tangga (RT)	Luas Wilayah (Ha)	Tingkat Kepadatan Penduduk
		Lk	Pr	Total			
1	<i>Dusun Lambelotong</i>	688	839	1.527	324	20.100	
2	<i>Dusun Pessunan</i>	460	558	1.018	226		
3	<i>Dusun Rondongan</i>	241	291	532	123		
4	<i>Dusun Puambuttu</i>	253	306	559	159		
5	<i>Dusun Galung</i>	231	278	509	141		
6	<i>Dusun Pummossi</i>	220	266	486	111		
7	<i>Dusun Batusasi</i>	208	251	459	106		
<i>T o t a l</i>		<i>2.301</i>	<i>2.789</i>	<i>5.090</i>	<i>1.090</i>		

Sumber: Data Desa Sumarrang

Dari Rekapitulasi jumlah penduduk Desa Sumarrang di atas, terlihat bahwa populasi laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan Perempuan. Dan dari jumlah penduduk di atas, hampir seluruhnya etnis Mandar (95% etnis Mandar), selebihnya merupakan etnis lain yang masuk karena ikatan perkawinan. Dan semuanya adalah pemeluk agama Islam (100 % beragama Islam).

Oleh karena kehidupannya yang homogen yakni beretnis asli Mandar dan juga seluruhnya memeluk agama Islam, maka kehidupannya pun sangat rukun, kekeluargaan yang tinggi, serta kekompakan dan solidaritas yang kuat antara satu sama lain. Selain itu, tradisi dan adat istiadat mereka di junjung tinggi dan terjaga dengan baik, itu juga karena faktor homogenitas Masyarakat Desa Sumarrang.

Namun demikian, mereka juga tidak tertutup dengan orang lain. Mereka senantiasa lapang dada menerima orang lain kapan saja. Sebagaimana lazimnya Masyarakat yang lain, Masyarakat Desa Sumarrang juga sangat menghargai orang lain dengan baik. Selain karena faktor agama, adatnya juga mengajarkan untuk senantiasa menghormati dan menghargai orang lain.

3. Keadaan Sosial Budaya

Desa Sumarrang dalam kategori keagamaan dan kebudayaan sangat homogen. Masyarakat Desa Sumarrang 100 % memeluk agama Islam. Karena kondisi internal mereka yang homogen, maka dinamika sosial kebudayaan dan keagamaan yang terjadi dalam Masyarakat Desa Sumarrang biasa-biasa saja, tidak ada lompatan sosial budaya yang terjadi secara cepat dan simultan.⁴¹

Namun demikian tidak bisa juga dikatakan bahwa tidak terjadi dinamika. Kalau dalam persoalan agama merata memeluk Islam, maka dalam tradisi kebudayaan begitu juga adanya.

Gambar 4.1: Adat budaya desa Sumarrang yakni acara Naik Kuda (*Missawe*) memakai baju adat mandar (*Ma'baju Pokko*)



⁴¹Data Desa Suamarrang tahun 2016.

Masyarakat Desa Sumarrang tetap memelihara tradisi budayanya dan hal ini yang membuat Masyarakat Desa Sumarrang tetap eksis sampai saat ini.

4. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian

Mata pencaharian secara umum dalam masyarakat Desa Sumarrang adalah bertani. Makanya petani merupakan entitas yang paling dominan dalam masyarakat Desa Sumarrang dipagi hari sampai siang rata-rata mereka dikebun atau ke ladang untuk mengurus dan merawat tanamannya.

Selain bertani, sebagian masyarakat juga menyelengi dengan beternak sebagai tambahan penghasilan. Kebanyakan dari mereka beternak kambing dan ayam. Namun karena hanya pekerjaan sampingan, maka beternak kambing tidak terlalu menonjol. Selain petani, beberapa dari Masyarakat Desa Sumarrang ini juga ada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekitar 0,4 %, Pensiunan dan wiraswastasekitar 0,6 %. Proporsi mata pencaharian penduduk masyarakat desa sumarrang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Proporsi Mata Pencaharian Penduduk Masyarakat Desa Sumarrang tahun 2016

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (%)
1.	<i>Petani</i>	60
2.	<i>Pegawai Negeri Sipil (PNS)</i>	0,4
3.	<i>Padi dan Palawija</i>	20
4.	<i>Pensiunan dan wiraswasta</i>	0,6
5.	<i>Pedagang</i>	10

Sumber: Data Desa Sumarrang

5. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Sumarrang terdiri dari 7 (tujuh) Dusun/Kampung yang terdiri dari, Dusun Lambelotong (Ibu kota Desa), Dusun Pessunan, Dusun Rondongan, Dusun Puambuttu, Dusun Galung, Dusun Pummossi dan Dusun Batusasi yang di pimpin Kepala Dusun.

Tabel 4.3 Periode Kepala Desa Sumarrang:

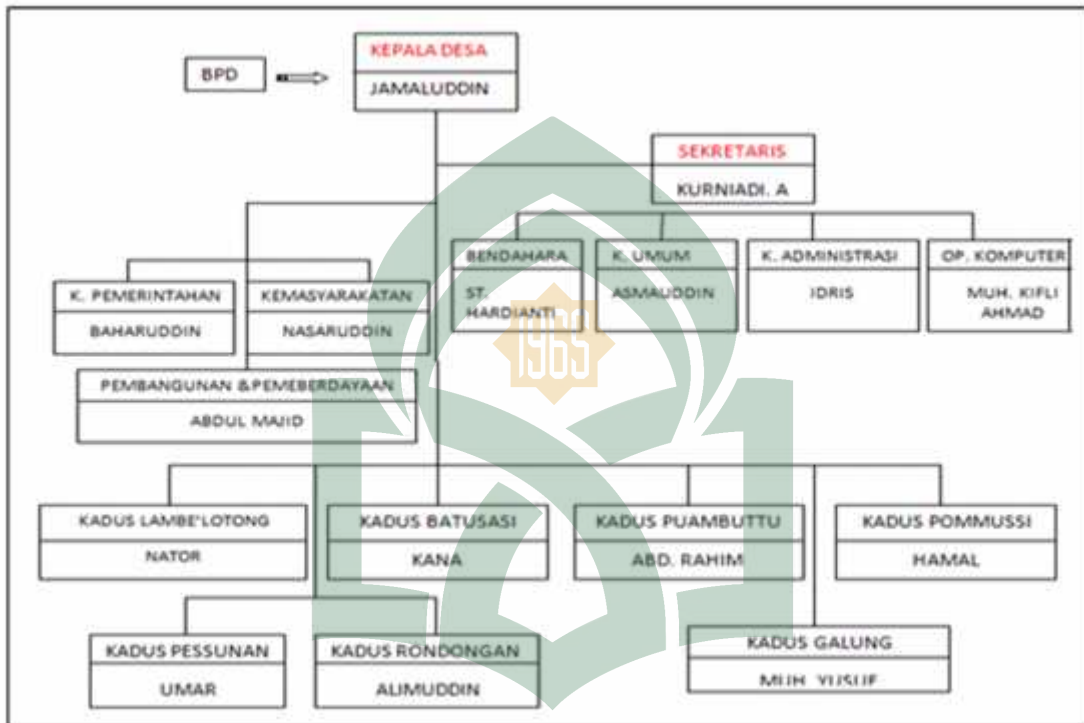
No	Pejabat Kepala Desa	Periode Menjabat	Keterangan
1	SANANG KANNA TIWERO	1960-1965	Penjabat
2	ARIFIN SALEDENG	1965-1967	Penjabat
3	MUH.SALEH	1967-1994	
4	H. ABD.KADIR SAPPE	1994-2001	
5	ABD.HUDA SALEH	2001-2006	
6	JAMALUDDIN,S.SOS	2006-2012	
7	JAMALUDDIN, S.Sos	2012-2018	

Sumber: Data Desa Sumarrang tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa pada saat Sanang Kanna Tiwero menjabat sebagai kepala desa yaitu pada tahun 1960 sampai masa Abd. Huda Saleh yaitu pada tahun 2006 itu rata-rata hanya menjabat selama 1 periode saja, namun yang terjadi sekarang pada saat Jamaluddin menjabat sebagai kepala desa yaitu pada tahun 2006 sampai sekarang itu menjabat selama 2 periode, dan tak lain Jamalauddin ini adalah putera dari Abd. Huda Saleh sendiri.

Jumlah pemerintah Desa Sumarrang saat ini ada orang sebagaimana yang tertera dalam struktur gambar berikut ini:

Bagan 4.1: Struktur pemerintahan Desa Sumarrang

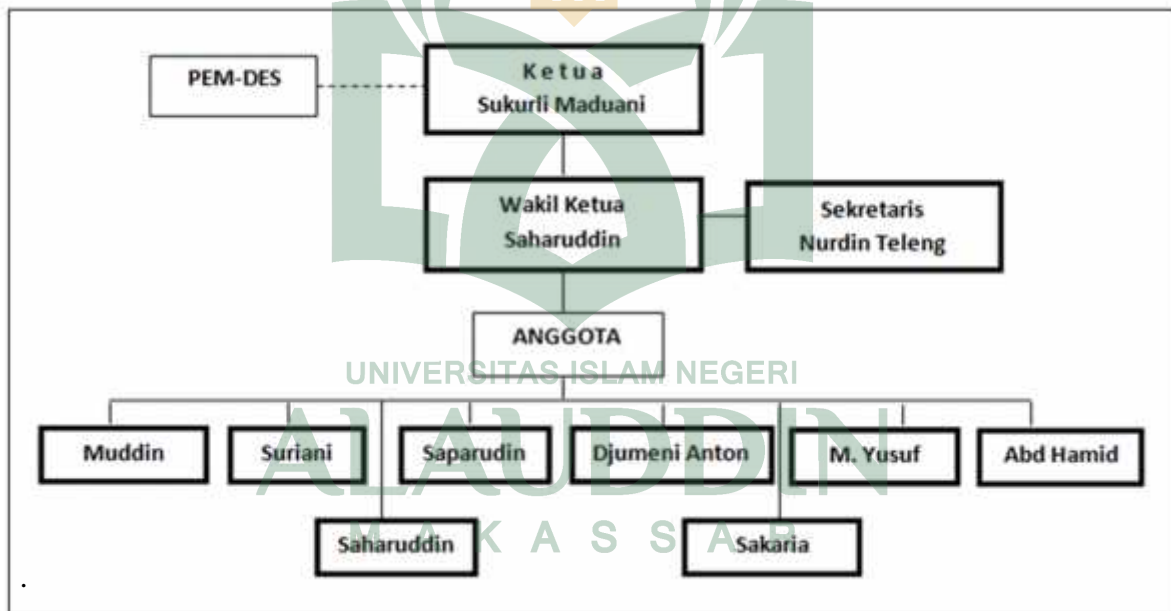


Pemerintah desa adalah kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. dari pengertian di atas, kita simpulkan bahwa yang termasuk pemerintah desa yaitu Kepala Desa. Untuk perangkat desa lainnya, merupakan pegawai lama, kecuali bendahara desa. Bendahara desa baru direkrut pada Tahun 2017 ini. Hal ini terjadi karena bendahara desa sebelumnya tidak mampu menjalankan aplikasi pengelolaan keuangan yang baru yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa setelah terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bendahara desa sebelumnya mengaku tidak

mampu menjalankan sistem keuangan desa, sehingga kepala desa merekrut pegawai baru untuk mengisi posisi bendahara desa.

Untuk mengimbangi pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif di desa, maka Badan Permusyawaratan Desa hadir sebagai lembaga legislatif di desa. masyarakat sangat berharap BPD menjadi lokomotif baru demokrasi desa yaitu sebagai sarana artikulasi, aspirasi, dan partisipasi, serta alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa.⁴²

Bagan 4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa



⁴² Linda Muchacha Paramitha dkk, “Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.4, h.92.

B. Kesiapan Perangkat Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Namun, tatkala desentralisasi melahirkan otonomi yang membuat pusat kehilangan kendali, maka desentralisasi juga sering dianggap sebagai sumber masalah. Inilah kurang lebih interpretasi yang dikembangkan oleh pemerintahan orde baru yang menjadi basis bagi terbangunnya pemerintahan yang sentralistik.⁴³

Seperti yang dikemukakan Sekretaris Desa Sumarrang berikut:

*“Alokasi dana desa di kabupaten polewali mandar merupakan suplay dari pemerintah kabupaten polewali mandar sebagai sarana penunjang dan juga impuls untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Sumarrang, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas”.*⁴⁴

Tabel 4.4: pendapatan transfer desa sumarrang pada tahun 2017

No	Pendapatan	Jumlah
1	Dana Desa	Rp.898.260.000,-
2	Bagi hasil pajak retribusi	Rp.1.171.500,-
3	Alokasi Dana Desa	Rp.547.949.00,-
	Jumlah pendapatan	Rp. 1.447.380.500,-

Sumber: Data Kantor Desa Sumarrang tahun 2017

⁴³ Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.33.

⁴⁴ Kurniadi Ahmad, umur: 42 tahun, pekerjaan: Sekretaris desa sumarrang, wawancara dilakukan di rumah informan pada tanggal 22 Mei 2017, pukul 11.00 WITA.

Pendapatan transfer ini membuat pendapatan desa sumarrang meningkat drastis. Pendapatan transfer inilah yang kemudian menjadi anggaran pendapatan Desa Sumarrang tahun 2017. Pendapatan yang dirincikan pada tabel diatas, kemudiandilakukan serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kesiapan pemerintah desa dalam mengelola dana desa merupakan inti dari penelitian ini. Kesiapan yang dimaksud tersebut adalah Kesiapan Organisasi, Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), Serta Kesiapan Sarana dan Prasarana desa yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa.

1. Kesiapan Organisasi

Organisasi adalah tempat manusia berinteraksi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka berinteraksi karena mempunyai kepentingan yang sama, kesamaan kepentingan merupakan syarat utama manusia bersedia masuk dalam organisasi tertentu.⁴⁵ Desa misalnya, kesiapan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang baru ini dibuat untuk melaksanakan

⁴⁵ Darsono, *Budaya Organisasi Kajian Tentang Organisasi, Budaya, Ekonomi, Sosial dan Politik*. (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010),h.57.

ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.⁴⁶

Tabel 4.5 : klasifikasi Sumber Daya Manusia (perangkat desa)

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	SMP	2
3	SMA	9
4	Diploma	-
5	Strata 1	3

Sumber: Data Desa Sumarrang tahun 2016

Kegiatan pemerintahan Desa Sumarrang didukung oleh 16 orang sumber daya manusia. Dari tabel diatas tercermin bahwa sebagian besar perangkat desa di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar masih mempunyai tingkat pendidikan yang masih agak rendah, sesuai tabel sebagian perangkat desa hampir sebagian besar berpendidikan sekolah menengah atas dan hanya Kepala Desa dan beberapa stafnya yang mengenyam pendidikan tinggi Strata 1. Dan jika dikaitkan dengan bagaimana kesiapan aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa itu belum bisa dikatakan siap sepenuhnya karena masih ada staf atau aparat pemerintahan desa yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya dan keahliannya.

⁴⁶ Menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa. diakses pada tanggal 20-07-2017 pukul 11.24.

Selain itu, untuk mengimbangi pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif di desa, maka Badan Permusyawaratan Desa hadir sebagai lembaga legislatif di desa. masyarakat sangat berharap BPD menjadi lokomotif baru demokrasi desa yaitu sebagai sarana artikulasi, aspirasi, dan partisipasi, serta alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa.⁴⁷

Berikut nama-nama yang sebagai Badan Permusyawaratan Desa Sumarrang.

Tabel:4.6 Nama anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumarrang

NO	NAMA	JABATAN
1	Sukurli Maudani	Ketua
2	Saharuddin	Wakil Ketua
3	Nurding Teleng	Sekretaris
4	Muddin	Anggota
5	Suriani	Anggota
6	Saparuddin	Anggota
7	Djumeni Anton	Anggota
8	Muh. Yusuf Usman	Anggota
9	Abd. Hamid	Anggota
10	Saharuddin	Anggota
11	Sakaria	Anggota

Sumber: Data Desa Sumarrang tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita lihat bahwa di Desa Sumarrang, mulai dari badan pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan bisa dikatakan

⁴⁷Linda Muchacha Paramitha dkk, “Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.4, h.92

bahwa struktur pemerintahannya sudah cukup baik. Namun yang menjabat sebagai ketua BPD saat ini yakni, Sukurli Maduani saat ini masih rankap jabatan. Selain sebagai ketua BPD, beliau juga merupakan Imam Desa Sumarrang.

Mengingat dalam suatu organisasi misalnya desa, itu sangat membutuhkan peranan seorang pemimpin atau tokoh pemerintah desa yang memiliki kompetensi atau atau pengetahuan (manajerial dan strategi) yang lebih, berperilaku yang baik, mampu mempengaruhi atau mengarahkan, orang lain, ketepatan dalam mengambil keputusan, bertanggungjawab, baik dalam penyampaian ide, bijak, mengayomi dan memberi motivasi.⁴⁸

Berikut Data kelembagaan / organisasi yang ada di Desa Sumarrang:

Tabel 4.7

NO.	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI	JUMLAH (KLP)	KETERANGAN
1	Badan Perwakilan Desa (BPD)	1	Aktif
2	L P M D	1	Tidak aktif
3	Karang Taruna	1	Ada Tetapi tidak Aktif
4	Remaja Mesjid	10	Aktif
5	Kelompok Tani	20	Aktif
6	PKK	1	Aktif
7	LKM	1	Aktif
8	S P P	3	Aktif
9	Pemdes	1	Aktif

Sumber: Data Desa Sumarrang 2016

⁴⁸Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 62.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa kelembagaan / organisasi yang ada di Desa Sumarrang terbilang cukup banyak, namun keaktifan dari lembaga tersebut masih belum sepenuhnya berjalan, dan itu dapat berpengaruh dalam proses pengelolaan keuangan desa serta implikasinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mencapai efektifitas dan efesiensi dalam melaksanakan Tata Kelola Dana Desamaka organisasi desa harus memiliki kesiapan mulai dari:

a. *Perencanaan Dana Desa*

Perencanaan sebuah kajian yang sangat umum, sehingga hampir semua bidang ilmu kita menemukan banyak sekali definisi tentang perencanaan. Dari beragamnya istilah tentang perencanaan dapat ditemukan dua unsur penting dalam perencanaan yaitu unsur hal yang ingin dicapai dan unsur cara untuk mencapainya.⁴⁹

Sebelum merencanakan Pengalokasi Dana Desa, terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran dana desa. Penentuan besarnya dana desa yang akan diterima disetiap desa di Kabupaten Polewali Mandar ditentukan berdasarkan penghitungan dana desa minimal dan dana desa proporsional. Dana desa minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk dana desa yang dibagi secara merata kepada seluruh desa se-Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan dana desa proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi

⁴⁹Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 118

Kabupaten serta ditetapkan dalam keputusan bupati. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa tersebut:

“Yang jadi bersyukurnya kita karena seluruh desa yang ada di Indonesia dapat jatah semua tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kesulitan yang ada di desa tersebut jadi keadilan disini betul-betul ada, karena besaran yang diterima oleh setiap desa itu tergantung dari luas wilayah dan jumlah penduduk. Dan desa sumarrang merupakan peraih dana terbesar dipolman bahkan sulbar, karena wilayahnya merupakan wilayah yang paling luas, kemudian mempunyai penduduk yang cukup banyak”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan transisi dari desa seragam yang diciptakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan sekaligus memberi landasan yang kuat bagi terwujudnya “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah akan tetapi justru sebaliknya desa merupakan “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri.⁵¹

Setelah melakukan perencanaan Alokasi Dana Desadan penentuan nilai bobot desa yang ditentukan oleh Tim Fasilitas Kabupaten, maka selanjutnya dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB setiap kegiatan tersebut kemudian dilampirkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan APBDes. Seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa tersebut:

“Hasil rembug desa mengenai apa saja yang direncanakan itu yang didanai. Jadi kita harus buat RKP (Rancangan Kerja Pembangunan) karena itu turunan

⁵⁰ Jamaluddin, umur 40 tahun, pekerjaan: Kepala Desa Sumarrang wawanacara dilakukan dib alai desa pada tanggal 22 Mei 2017, pukul 09.00 WITA.

⁵¹ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomiyang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.166

*dari RPJMDes nah itu untuk yang lima tahunan, yang menjadi dasar dalam penyusunan APBDes, Jadi setiap tahunnya kita rumuskan bersama masyarakat apa yang menjadi kebutuhan kita”.*⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa andil yang paling besar atau peranan yang paling besar ini adalah masyarakat, apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang ditindaklanjuti bukan keinginan pelaku-pelaku pemerintahan di desa seperti kades, sekdes, dan aparat. Tetapi tergantung apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya dapat menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri secara ekonomis sehingga upaya peningkatan sumber daya manusia.⁵³

Seperti yang dikemukakan oleh Bendahara Desa Sumarrang berikut:

*“APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permasyarakatan Desa. APBDes terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa”.*⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan

⁵² Kurniadi Ahmad, umur: 42 tahun, pekerjaan: Sekretaris desa sumarrang, wawancara dilakukan di rumah informan pada tanggal 22 Mei 2017, pukul 11.00 WITA.

⁵³Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomiyang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) ,h.166

⁵⁴ St. Hardianti, umur: 23 tahun, pekerjaan: Sekretaris Desa Sumarrang, wawancara dilakukan di balai desa pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 09.30 WITA.

pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Adapun APBDesa Sumarrang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumarrang Tahun 2017

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	PENDAPATAN	Rp
	Dana Desa	Rp. 949.260.000,-
	Bagi Hasil Pajak Retribusi	Rp. 1.171.500,-
	Alokasi Dana Desa	Rp. 547.949.000,-
	JUMLAH PENDAPATAN	RP. 1.447.380.500,-
2	BELANJA	
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
	1. Penghasilan tetap perangkat desa & tunjangan BPD	Rp. 204.000.000,-
	2. Operasional Kantor Desa	Rp. 60.209.500,-
	3. Operasional BPD	Rp. 1.200.000,-
	4. Perencanaan Pembangunan Desa	Rp. 2.400.000,-
	5. Pengelolaan Informasi Desa	Rp. 5.176.000,-
	JUMLAH BELANJA	Rp. 272.985.500,- (18,86%)
	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	
	1. Pembangunan Jalan	
	➤ Pembangunan Jalan Desa	Rp. 550.722.000,-
	➤ Pembangunan Drainase	Rp. 104.200.000,-
	➤ Pengadaan Lampu Jalan	Rp. 94.000.000,-
	2. Pembangunan Sarana Kesehatan (Posyandu)	Rp. 61.405.000,-
	3. Pembangunan Sarana Sanitasi (Jamban Keluarga)	Rp. 35.625.000,-
	4. Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan (Bronjong)	Rp. 44.611.000,-

	5. Pembangunan Sarana Air Bersih (Perpipaan dan Sumur Gali) JUMLAH BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 2. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 3. Pembinaan PKK 4. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 5. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 6. Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) JUMLAH BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Pelatihan Kepala Desa/ Perangkat Desa 2. Pelatihan Pengelola BUMDes 3. Pemberdayaan Posyandu dan Transpor Ibu Melahirkan JUMLAH BELANJA TOTAL JUMLAH BELANJA	Rp. 66.297.000,- Rp. 956.860.000,- (66,11%) Rp. 12.000.000,- Rp. 28.450.000,- Rp. 9.835.000,- Rp. 15.250.000,- Rp. 5.900.000,- Rp. 77.400.000,- Rp. 148.835.000,- (10,28%) Rp. 5.500.000,- Rp. 5.400.000,- Rp. 27.800.000,- Rp. 38.700.000,- (2,68%) Rp. 1.417.380.500,-
	PEMBIAYAAN A. PENYERTAAN MODAL BUMDes JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp. 30.000.000,- Rp. 30.000.000,- (2,68%)

Sumber: Data Kantor Desa Sumarrang

Dari tabel diatas, dilihat bahwa pendapatan Desa Sumarrang tidak habis setelah dibelanjakan. Sisa hasil belanja itu pun sebanyak Rp. 30.000.000,-. Dan dana tersebut

pun kemudian dimasukkan kedalam penyertaan modal desa yang akan dialokasikan untuk BUMDes.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa termasuk juga didalamnya penggunaan anggaran. Anggaran pendapatan desa sebagaimana yang terdapat pada tabel 4.6 diatas, akan digunakan untuk beberapa bidang pembiayaan sebagaimana yang terdapat dalam APBDesa Sumarrang 2017.

Penggunaan anggaran desa sebagaimana yang terdapat pada tabel diatas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran desa didominasi oleh pembiayaan dibidang pembangunan dan penyelenggara pemerintahan desa.

Seperti yang dikatakan oleh Kasi Pemerintahan di Desa Sumarrang tersebut:

*“Sumber dana desa ada 2 ada yang dari APBN Sekitar 900 juta, dan dan yang bersumber dari APBD sekitar 500 juta lebih, jadi rincian dana desa yang dari kabupaten tercakup semua gaji-gaji tetap aparat desa dan itu murni penggajian dari kabupaten, kemudian operasional, kemudian tunjangan. Kalau yang bersumber dari pusat yaitu sekitar 900 juta itu terbagi-bagi lagi fisik sekian persen dan pemberdayaan sekian persen, sesuai dengan amanat pak presiden porsinya lebih besar difisik dulu sekitar 70% untuk pembangunan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di desa lebih membutuhkan infrastruktur, namun tidak mengenyampingkan pemberdayaan masyarakat, dan kepemudaan”.*⁵⁵

Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku

⁵⁵ Baharuddin, umur: 48 tahun, pekerjaan: Kasi Pemerintahan Desa Sumarrang, wawancara dilakukan di alai desa pada tanggal 23Mei 2017, pukul 08.50 WITA

yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga alokasi dana desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Secara umum pelaporan merupakan suatu fase penting dalam siklus manajemen. Selain dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dari hasil kinerja seseorang atau pimpinan lembaga atau organisasi terhadap pihak-pihak yang memberi mandat, juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi diri guna perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Dalam manajemen pemerintahan desa misalnya, pelaporan juga mempunyai fungsi sebagai media akuntabilitas atau pertanggungjawaban selama mengemban tugas atau mandat untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan.⁵⁶

Pelaporan dan pertanggungjawaban dalam perspektif islam juga dijelaskan dalam Q.S Al-Nisa/ 4 : 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁵⁷

⁵⁶ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomiyang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) ,h.155.

⁵⁷Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 87.

Makna dari ayat tersebut adalah jika seorang dipercaya melaksanakan amanah, maka harus menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Bentuk amanah berupa jabatan seperti jabatan Kepala Desa, jabatan sebagai bendahara desa, dan perangkat desa lainnya. Sehingga orang yang memperoleh jabatan tersebut memiliki kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan desa dalam rangka menyampaikan amanah yang telah dipercayakan.

Setelah pelaksanaan penganggaran terlaksana maka tahapan selanjutnya yaitu Pelaporan dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan desa. Pelaporan terkait pengelolaan keuangan desa dilakukan secara bertahap yakni tahap pertama bulan januari-juni, tahap kedua bulan juli-september, dan tahap ketiga bulan oktober-desember. Untuk tahap pertama sudah selesai, sekarang memasuki tahap kedua. Pada kenyataannya, laporan pertanggungjawaban ini sering terlambat, keterlambatan ini dipicu oleh pemerintah desa dalam tahap pembelajaran, dan ini menyebabkan pencairan dana pun jadi terhambat.

Hal ini dibenarkan oleh Kaur Umum Desa Sumarrang:

*“Untuk pelaporannya sendiri, bisa dikatakan tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan, bendahara desa sebagai pengelola Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) masih dalam pembelajaran dan proses adaptasi. Dan ini juga menyebabkan dana desa juga terlambat cair karena dana akan cair kalau sudah ada pelaporan tahap sebelumnya”.*⁵⁸

⁵⁸ Asmauddin, umur 38 tahun, pekerjaan: Kaur Umum Desa Sumarrang, wawancara dilakukan di alai desa pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 08.50 WITA

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa itu tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena aparat pemerintah desa yakni bendahara desa belum telalu fasih dalam mengelola sistem keuangan desa. Dan hal ini juga menyebabkan pencairan dananya tidak berjalan lancar atau tersendat-sendat.

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan adalah sumber daya manusia (SDM) pengelola itu sendiri. Untuk mengukur SDM pemerintah desa dapat pula dilihat dari aspek pengalaman dan pendidikannya serta pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pemerintahan Desa Sumarrang saat ini didukung oleh 16 orang Sumber Daya Manusia (perangkat desa) dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.9 Tingkat pendidikan aparat pemerintah Desa Sumarrang

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	SMP	2
3	SMA	9
4	Diploma	-
5	Strata 1	3

Sumber: Data Desa Sumarrang 2016

Dari tabel diatas tercermin bahwa sebagian besar perangkat desa di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar masih mempunyai tingkat pendidikan yang masih terbilang rendah, sesuai tabel sebagian perangkat desa hampir sebagian besar berpendidikan sekolah menengah atas dan hanya Kepala Desa dan beberapa stafnya yang mengenyam pendidikan tinggi Strata 1. Dan jika dikaitkan dengan bagaimana kesiapan aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa itu belum bisa dikatakan siap sepenuhnya karena masih ada staf atau aparat pemerintahan desa yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya dan keahliannya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh *United Nation Development Program* terkait karakteristik *Good Governance*, maka dalam pengelolaan dana desa sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan pada pemerintahan terkecil yaitu desa.⁵⁹ Implementasi program dana desa Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa.

⁵⁹Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan yang baik"* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h.10

Tabel: 4.10 Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sumarrang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Keterangan	Persentase Kehadiran
1	Kepala Desa	100%
2	Perangkat Desa	90%
3	BPD	95%
4	Tokoh masyarakat dan tokoh agama	90%
5	Lembaga masyarakat (PKK, Karang taruna, LPMD)	85%
	Rata-rata tingkat partisipasi	92%

Sumber: Data Desa Sumarrang 2016

Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

*“Lapisan masyarakat selalu antusias jika menyangkut musrembang karena itu menyangkut pembangunan yang ada di desa, hal tersebut bisa dilihat dari laporan Musrembangdes hampir semua anggota Badan Permusyawaratan Desa hadir, terdiri dari 10 orang BPD yang mewakili masyarakat, kemudian Penggunaan dana desa tergantung dari kebutuhan pemerintah desa bersama dengan masyarakat”.*⁶⁰

Dari data tabel dan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada saat melakukan Musrembang tingkat partisipasi seluruh aparat pemerintahan desa beserta masyarakat cukup besar karena ini merupakan suatu tempat untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses perencanaan pengalokasian Dana Desa.

⁶⁰ Sukurli Maudani umur 49 tahun, pekerjaan: Ketua BPD Desa Sumarrang, wawancara dilakukan di rumah informan pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 11.00 WITA.

Hal ini juga dibenarkan dalam tinjauan islam, mendengarkan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan atau dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, adalah perlu, dalam Al-quran surah sesuai firman Allah swt dalam Q.S Al- Imran/ 3: 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*⁶¹

Penjelasan ayat di atas bahwa, dalam urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya hendaklah bermusyawarah. Karena bermusyawarah dapat dipahami sebagai upaya mendengarkan aspirasi yang bukan hanya pada lingkup yang sempit, tapi dalam arti yang luas.⁶²

⁶¹ Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), h.71.

⁶² Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 111.

3. Kesiapan Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan keuangan desa, MusremBangDes diadakan di aula kantor desa Sumarrang. Aula ini dapat menampung seluruh Pemerintah Desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat dari setiap dusun. Kebutuhan lain seperti: kursi dan meja juga tersedia di kantor desa Sumarrang. Berikut daftar sarana dan prasarana yang ada di Desa Sumarrang:

Tabel 4.11. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Sumarrang

Gedung Kantor	Ada
Kondisi	Baik
Jumlah ruang kerja	2 Ruang
Balai Desa/ Kelurahan/ sejenisnya	Ada
Listrik	Ada
Air bersih	Tidak
Telepon	Tidak
Rumah Dinas Kepala Desa/ Lurah	Tidak
Rumah Dinas Perangkat Desa/ Kelurahan	Tidak
Inventaris dan alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	1 buah
Jumlah meja	6 buah
Jumlah kursi	50 buah
Jumlah almari arsip	2 buah
Komputer	1 unit
Mesin fax	unit
Kendaraan dinas	1 unit
Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan	
Buku Data Peraturan Desa	Ada, Terisi

Buku Keputusan Kepala Desa/ Lurah	Ada, Terisi
Buku administrasi kependudukan	Ada, Terisi
Buku data inventaris	Ada, Terisi
Buku data aparat	Ada, Terisi
Buku data tanah milik desa/ tanah kas desa/ milik kelurahan	Ada/ Tidak, Terisi/ Tidak
Buku administrasi pajak dan retribusi	Ada, Terisi
Buku data tanah	Ada, Terisi
Buku laporan pengaduan masyarakat	Ada, Terisi
Buku agenda ekspedisi	Ada, Terisi
Buku profil desa/ kelurahan	Ada, Terisi
Buku data induk penduduk	Ada, Terisi
Buku data mutasi penduduk	Ada, Terisi
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan	Ada, Terisi
Buku registrasi pelayanan penduduk	Ada, Terisi
Buku data penduduk sementara	Ada, Terisi
Buku anggaran penerimaan	Ada, Terisi
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan	Ada, Terisi
Buku kas umum	Ada, Terisi
Buku kas pembantu penerimaan	Ada, Terisi
Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan	Ada, Terisi
Buku data lembaga kemasyarakatan	Ada, Terisi

Sumber: Data Desa Sumarrang tahun 2016

Berdasarkan data tabel diatas maka dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di Desa Sumarrang sudah cukup baik sekalipun masih ada sarana dan prasarana desa yang belum terpenuhi dengan baik.

C. Dampak Sosial dan Ekonomi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/ kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya masyarakat.⁶³

Pembangunan masyarakat yang memiliki makna sebagai proses perubahan, dimana perubahan dalam kehidupan masyarakat dapat berdampak kemunduran (*regress*) maupun kemajuan (*progress*) tetapi tentunya yang diharapkan adalah kemajuan. Gambaran paling sederhana untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan adalah dengan melihat apakah perubahan tersebut dapat berdampak pada semakin banyak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat yang terpenuhi maka merupakan indikasi semakin meningkatnya kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat.⁶⁴ Berdasarkan hal tersebut dampak pengelolaan dana desa dapat dianalisis dari dampak sosial maupun dampak ekonomi.

1. Sosial

a. Dampak Pada Organisasi

⁶³[http://www.googlr.com/search?client=firefox-b&q=jurnal+pengelolaan+alokasi+dana+desa+\(add\)+di+desa-desa+kecamatan+rogojompri](http://www.googlr.com/search?client=firefox-b&q=jurnal+pengelolaan+alokasi+dana+desa+(add)+di+desa-desa+kecamatan+rogojompri), diakses pada tanggal 19-07-2017 pukul 08.28 WITA.

⁶⁴Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 42.

Di dalam suatu desa ada 3 organisasi desa yang penting, dan sebenarnya akan sangat baik apabila berjalan dengan baik apabila berjalan dengan benar tidak hanya nama dan bergerak secara benar pula untuk kepentingan desa, yaitu:

1. LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) merupakan wadah organisasi desa.
2. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) merupakan wadah para wanita dan ibu-ibu
3. KT (Karang Taruna) merupakan wadah para pemuda.

Tinggal mengaktifkan dan dikembangkan sehingga partisipasi yang jelas pada saat Rapat Kerja Mini dan Lokakarya Mini di tingkat kecamatan.⁶⁵

Ketiga institusi di atas diharapkan bersinergi untuk mewujudkan, mempercepat dan memperkuat implementasi otonomi desa dan memfasilitasi memberdayakan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶ Namun, diantara ketiga instansi tersebut diatas yang aktif di desa sumarrang itu hanya lembaga organisasi PKK saja, dan itu berdampak pada kurangnya pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa.

Dampak pengalokasian dana desa dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari kesiapan organisasi sebagaimana yang

⁶⁵Boy S. Sabarguna, *Pengembangan Posyandu, Peningkatan Pendapatan, Pengolahan Sampah juga Seni dan Pariwisata dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Segung Seto, 2009), h. 90.

⁶⁶Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomiyang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) ,h. 170.

telah diketahui bahwa sebagian besar perangkat desa di Desa Sumarrang masih mempunyai tingkat pendidikan yang sangat rendah, Dimana sebagian besar perangkat desa hanya berpendidikan Sekolah dasar, Sekolah menengah atas dan hanya kepala desa dan beberapa stafnya yang mengenyam pendidikan tinggi yaitu strata 1.

Hal demikian juga dipaparkan oleh ketua Kelompok Bina Tani Remaja berikut:

*“kalau dilihat dari kesiapan organisasi, pemerintahan desa sudah cukup baik karena semua anggota kepengurusan lengkap hanya saja yang menjadi anggota dalam pemerintahan desa hanya lulusan SD, SMP, dan SMA. Hanya kepala desa saja yang sarjana, jadi kebanyakan mereka bekerja tidak sesuai dengan kemampuannya”.*⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa, jika dikaitkan dengan bagaimana kesiapan aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa itu belum bisa dikatakan siap sepenuhnya karena masih ada staf atau aparat pemerintahan desa yang bekerja tidak sesuai dengan bidang dan keahliannya.

b. Dampak Pada Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai ukuran kesejahteraan, maka dalam setiap masyarakat harus tersedia sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat sering juga disebut sebagai usaha untuk menciptakan hubungan yang serasi antara sumber-sumber yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat. Apabila hubungan yang harmonis tersebut dapat terwujud, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud pula, tapi apabila yang

⁶⁷ Nur Lina, umur 47 tahun, pekerjaan: Ketua Kelompok Tani Bina Remaja, wawancara dilakukan di rumah informan pada tanggal 21 Mei 2017, pukul 80.30 WITA.

terjadi adalah sebaliknya maka yang akan ditemukan adalah adanya berbagai bentuk masalah sosial.⁶⁸

Dalam rangka mewujudkan proses tersebut maka yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk melakukan identifikasi sumber daya, kemudian mengelola dan memanfaatkannya dengan baik. Dengan hal demikian merupakan salah satu langkah yang strategis dalam pembangunan masyarakat. Terkadang dijumpai suatu kenyataan yang ironis, bahwa suatu masyarakat tersedia sumber daya yang cukup besar sedangkan kehidupan masyarakat sedemikian buruknya sehingga membutuhkan peningkatan dengan segera.

Dampak pengalokasian dana desa dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari kesiapan Sumber Daya Manusia sebagaimana yang telah dipaparkan oleh saudari Maryani berikut:

*“SDM di Desa kita itu masih belum memadai, mengapa demikian, lihat saja pada struktur pemerintahan desa siapa-siapa yang ada didalamnya, kebanyakan dari mereka tidak berpendidikan tinggi, tapi mereka diberi tugas dan wewenang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang diemban, tarolah bendahara desa, yang saya tahu bendahara yang sekarang itu hanya lulusan SMA, meskipun sekarang masih kuliah tapi jurusan yang dia ambil pun tidak sesuai dengan tugasnya di desa, seharusnya yang menjadi bendahara itu anak manajemen atau Akuntansi yang memang mengerti tentang bagaimana cara memenejemenkan dan mengelola keuangan”.*⁶⁹

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh saudara Arsyad:

Dari segi pemberdayaan masyarakat itu masih sangat kurang, seperti masalah, transparansi aparat pemerintah desa, pemberian bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan) yang seharusnya mendapat bantuan justru dia yang tidak dapat, mereka yang tidak layak malah mereka yang dapat, seperti

⁶⁸Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 43.

⁶⁹ Maryani, umur: 22 tahun, pekerjaan: pemuda desa sumarrang, wawancara dilakukan di rumah informan pada tanggal 29 Mei 2017, pukul 09.30 WITA.

*halnya pembagian raskin, begitu juga dengan bantuan-bantuan lainnya. Seandainya pemberdayaan masyarakat di Desa Sumarrang itu luar biasa, tidak mungkin kita sebagai masyarakat desa meninggalkan kampung kita”.*⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dilihat bahwa kesiapan SDM yang ada di Desa Sumarrang masih sangat kurang, dan dampaknya adalah tidak optimalnya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat, tidak terwujudnya *Good Governance*, karena mengingat SDM yang ada hanya tamatan SD, SMA, dan hanya kepala desa yang memiliki riwayat pendidikan tinggi yaitu Strata 1. Kemudian dari segi pemberdayaan, juga belum bisa dikatakan baik karena masih terdapat masalah-masalah di desa seperti masalah transparansi pengelolaan keuangan desa, pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang tidak berpegang teguh pada indikator *Good Governance*, sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi terbengkalai. Begitu juga dengan bantuan-bantuan lainnya seperti PKH (Program Keluarga Harapan), Pembagian raskin, dan lain-lain juga belum bisa dikatakan baik, melihat yang terjadi di desa yang seharusnya mendapat bantuan justru dia yang tidak dapat, mereka yang tidak layak, malah mereka yang mendapatkan bantuan.

⁷⁰ Arsyad, umur 24 tahun, pekerjaan: pemuda desa sumarrang, wawancara dilakukan di rumah informan pada tanggal 30 Mei 2017, pukul 11.00 WITA.

2. *Ekonomi*

a. *Dampak pada Kesiapan Sarana dan Prasarana*

Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa didasarkan diatas besaran jumlah kebutuhan dan standar teknis dalam menunjang pelaksanaan yang diberikan. Penyediaan sarana dan prasarana tidak hanya pada lingkup pemerintahan desa saja tetapi pembangunan infrstruktur seperti pembangunan jalan atau rabat beton, pembuatan drainase, dan bronjong untuk menunjang kelancaran aktivitas dan kemjuan desa Sumarrang.

Dampak pengalokasian dana desa dalam peningkatan pembangunan di desa Sumarrang dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana, seperti yang dikemukakan oleh Kaur pembangunan dan Pemberdayaan Desa Sumarrang berikut:

“Sarana dan Prasarana di Desa Sumarrang itu sudah cukup baik, satuji kendalanya di desa kita itu masih kurang sekali jaringannya, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu seperti mengakses internet itu kadang susah dilakukan di desa kita, adaji jaringannya tapi kadang timbul kemudian tenggelam lagi”.⁷¹

Pengalokasian dana desa dalam peningkatan pembangunan di desa Sumarrang dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana, beberapa sudah terealisasikan seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Syarif :

“Untuk segi Pembangunan sendiri sudah memberikan dampak yang cukup bagus, karena melihat selama pemerintahan kepala desa sendiri itu sudah banyak pembangunan, baru- baru ini pembuatan drainase disetiap dusun sudah selesai, kemudian yang sekarang pembangunan bronjong sementara berjalan, kemudian Bumdes sendiri sudah diresmikan tinggal menunggu dana

⁷¹ Abd. Majid, umur: 46 tahun, pekerjaan: Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, wawancara dilakukan di balai desa Sumarrang pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 08.20 WITA.

cair, kemudian bantuan-bantuan untuk kelompok tani sendiri itu sudah ada dan itu sangat membantu kita sebagai masyarakat”.⁷²

Hal serupa juga dikatakan oleh Maslan Mahmud:

“Dampaknya baik karena di desa kita pembangunan akses jalan itu sudah terealisasi, jalanan yang dulunya becek kalau hujan sekarang sudah gampang dilalui dan itu semua berkat bantuan dari pemerintah, dan kerja pemerintah desa.”

Dampak dari pembangu di desa sumarrang memang sudah dirasakan oleh masyarakat setempat dan ada kenyamanan tersendiri yang dirasakan seperti yang diungkapkan oleh Rasamia:

“Dampak dari pembangunan membuat saya sudah merasa nyaman, transportasi sudah gampang meskipun belum begitu memadai dan tidak semua masyarakat desa yang ada di desa sumarrang itu meraskan hal yang sama, mengapa saya megatakan demikian perbaikan akses jalan di Dusun pessunan itu belum sepenuhnya selesai”.⁷³

Pembangunan di Desa Sumarrang masih ada dusun yang belum sepenuhnya terealisasi pembangunannya dikarenakan memang setiap dusun ada batasan-batasan pembangunannya seperti yang diungkapkan oleh Arsyad bahwa:

“Dari segi pembangunan berdampak positif karena kan namanya juga pembangunan, meskipun di Desa Sumarrang itu hanya dikenakan beberapa meter saja setiap dusunnya seperti rabat beton, drainase, dan bronjong”.⁷⁴

⁷² Ahmad Syarif, umur: 23 tahun, pekerjaan: pemuda desa Sumarrang, wawancara dilakukan di rumah informan pada tanggal 30 Mei 2017, pukul 10.10 WITA.

⁷³ Rasamia, umur: 67 tahun, pekerjaan: ibu rumah tangga, Dusun Pessunan, desa sumarrang, wawancara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2017, pukul 10.30 WITA.

⁷⁴ Arsyad, umur: 24 tahun, pekerjaan: pemuda desa sumarrang, wawancara dilakukan di rumah informan pada tanggal 30 Mei 2017, pukul 11.00 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pembangunan di desa Sumarrang sudah dianggap baik oleh masyarakat meskipun semuanya belum terealisasi. Namun, dalam kesejahteraan masyarakat belum dirasakan baik oleh masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Syarif:

*“Yang menjadi kekurangan di desa kita itu seperti masalah kebersihan. Seharusnya dilakukan pengadaan tempat sampah agar supaya di desa kita itu terjaga kebersihannya. Sehingga masyarakat lebih nyaman dan sejahtera”.*⁷⁵

Selain dari masalah kebersihan ada juga keluhan dari pemuda Desa Sumarrang terkait bagian kepemudaan seperti yang diungkapkan oleh Maslan Mahmud:

*“Mungkin yang perlu dibenahi dibagian kepemudaan desa, jika melihat kondisi Desa sekarang itu kurang sekali ketersediaan alat-alat olah raga, bangunan-bangunan seperti kantor BPD itu juga belum jelas di desa kita, kemudian pembentukan remaja masjid juga belum ada padahal itu masuk kedalam program kerja Desa Sumarrang”.*⁷⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan maka dapat diketahui bahwa dampak pengalokasian dana desa dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Sumarrang lihat bahwa Sarana dan Prasarana di Desa Sumarrang itu bisa dikatakan sudah cukup baik hanya saja jaringan internet itu masih sangat kurang sehingga kebutuhan untuk mengakses internet itu masih terbengkalai. Jika dilihat dari segi kesiapan sarana dan prasarana memang memberikan dampak yang positif bagi masyarakat namun tidak semua masyarakat tersebut merasakan hal yang sama, mengingat bantuan pembangunan disetiap dusun

⁷⁵ Ahmad Syarif, umur: 23 tahun, pekerjaan: pemuda desa Sumarrang, wawancara dilakukan di rumah informan pada tanggal 30 Mei 2017, pukul 10.10 WITA.

⁷⁶ Maslan Mahmud, umur 24 tahun, pekerjaan: pemuda desa sumarrang, wawancara dilakukan di rumah informan pada tanggal 30 Mei 2017, pukul 11.00 WITA.

itu hanya beberapa meter saja, dan dampak positif dari pembangunan tersebut belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Dampak lain yang ditimbulkan dari minimnya sarana dan parasarana yang dimiliki oleh desa seperti ketersediaan yang dianggap dapat mendukung proses kelancaran serta menumbuhkan kaidah *Good Governance* yang masih terbatas seperti ketersediaan mesin tik dan computer itu hanya masing-masing hanya ada satu unit, yang dampaknya dapat menghambat tata kelola serta pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa disebabkan ketersediaan alat atau barang yang kurang memadai.

b. Dampak Pada Pendapatan Desa

Pendapatan transfer desa sumarrang pada tahun 2017 berjumlah RP. 1.447.380.500,-, pendapatan tersebut berasal dari pendapatan dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa.

Alokasi dana desa mestinya berdampak terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang dimaksud adalah sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.⁷⁷

⁷⁷Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014) h, 112.

Berdasarkan APBDes tahun 2017 tercatat Rp.38.700.000 atau sekitar 2,68 %, angka ini sangatlah minim dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Padahal Pemberdayaan kemasyarakatan mestinya memiliki porsi anggaran yang lebih besar sebab menyangkut kualitas sumber daya masyarakat di desa Sumarrang. Hal ini berbeda dengan anggaran yang digunakan di sektor Pembinaan Kemasyarakatan berjumlah 148.835.000 atau sekitar 10,28% angka ini juga masih sangatlah minim untuk menopang perbaikan kualitas sumberdaya manusia di desa Sumarrang yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Kurang idealnya porsi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Summarang dikeluhkan oleh masyarakat, misalnya menurut Maslan Mahmud :

“Mungkin yang perlu dibenahi dibagian kepemudaan desa, jika melihat kondisi Desa sekarang itu kurang sekali ketersediaan alat-alat olah raga.”⁷⁸

Berdasarkan kutipan Wawancara tersebut dapat diketahui bahwa porsi anggaran yang kecil menjadi keluhan masyarakat. Hal ini menurut penulis akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sektor pendapatan masyarakat sebenarnya dapat meningkat ketika program BUMDes berjalan maksimal namun meskipun program ini dianggarkan dengan nominal Rp.30.000.000 justru tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan desa dan peningkatan ekonomi masyarakat. Program BUMDes sampai saat ini justru belum terlaksana. Padahal BUMDes ketika dilaksanakan secara berkesinambungan dapat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat.

⁷⁸ Maslan Mahmud, umur 24 tahun, pekerjaan: pemuda desa sumarrang, wawancara dilakukan di rumah informan pada tanggal 30 Mei 2017, pukul 11.00 WITA.

Selain itu alokasi dana desa mestinya diprioritaskan pada bantuan permodalan dan bantuan tani, tidak hanya monoton pada sektor pembangunan, meskipun pembangunan juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dikarenakan akses menjadi mudah, namun tetap saja sektor lain mesti mendapat porsi anggaran yang berimbang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pemerintah Desa Sumarrang belum menerapkan Kaidah-kaidah *Good Government* sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumarrang dapat diketahui dengan melihat Kehadiran pemerintah dalam mengelola dana Desa. Efektifitas dana desa yang dikelola dapat diketahui dengan melihat beberapa unsur, diantaranya yang pertama kesiapan organisasi, organisasi yang ada di Desa Sumarrang belum optimal misalnya ada 3 organisasi desa yang penting dan sebenarnya akan sangat baik apabila berjalan dengan benar dan tidak hanya nama saja, organisasi tersebut adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Karang Taruna (KT). Diantara ketiga organisasi tersebut, yang aktif hanyalah PKK saja, hal ini menunjukkan bahwa belum ada Kesiapan organisasi, serta sinergitas ketiga organisasi tersebut.

Selain dari sisi Kesiapan organisasi unsur yang kedua adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), data dilapangan menunjukkan bahwa aparat pemerintah Desa belum bisa dikatakan siap sepenuhnya karena masih ada staf atau aparat pemerintahan desa yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya dan keahliannya. Misalnya Tingkat Pendidikan Aparatur Desa masih sangat rendah yaitu hanya sampai pada jenjang SD, SMP dan SMA dan hanya beberapa orang saja yang menempuh jenjang S1.

Unsur yang ketiga adalah kesiapan Sarana dan Prasarana, Dibandingkan dengan unsur lainnya, unsur sarana dan prasarana di Desa Sumarrang sudah cukup baik namun belum maksimal, sebab kecenderungan Pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa terhadap infrastruktur begitu kaku, gelontoran dana yang besar diperuntukkan untuk membangun seperti rabat beton, drainase, dan bronjong. Pemerintah desa justru mengabaikan perlunya pengadaan Komputer, Mesin TIK dan berbagai sarana lain yang dapat pula menunjang pelayanan administrasi masyarakat desa Sumarrang,.

Selain ketiga unsur diatas, Efektivitas Pengalokasian dana desa dapat diketahui dengan melihat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pengalokasian dana desa. Dampak sosial yang ditimbulkan adalah dampak terhadap kesiapan organisasi dan sumber daya manusia. Dari segi kesiapan organisasi tidak aktifnya ke 3 organisasi Desa yaitu PKK, LKMD dan Karang Taruna membuat interaksi masyarakat tidak berjalan efektif, padahal hadirnya organisasi tersebut semestinya menjadi alat yang dapat mempersatukan masyarakat.

Dampak Sumber Daya Manusia semestinya memberikan ruang yang besar terhadap masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan dan program Pemerintah Desa Sumarrang, selain itu tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang masih terbilang dibawah rata-rata sehingga mempengaruhi pelayanan serta iklim organisasi desa.

Sedangkan dampak ekonomi meliputi Kesiapan Sarana dan Prasarana, sektor ini memberikan dampak positive terhadap masyarakat namun tidak semua masyarakat

tersebut merasakan hal yang sama, mengingat bantuan pembangunan di setiap dusun itu berbeda-beda.

Dampak pada pendapatan desa sebenarnya dapat meningkat ketika program BUMDes berjalan maksimal namun meskipun program ini dianggarkan dengan nominal Rp. 30.000.000 justru tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan desa dan peningkatan ekonomi masyarakat. Program BUMDes sampai saat ini justru belum terlaksana. Padahal BUMDes ketika dilaksanakan secara berkesinambungan dapat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat.

Selain itu alokasi dana desa mestinya diprioritaskan pada bantuan permodalan dan bantuan tani, tidak hanya monoton pada sektor pembangunan, meskipun pembangunan juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dikarenakan akses menjadi mudah, namun tetap saja sektor lain mesti mendapat porsi anggaran yang berimbang.

B. Implikasi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa:

1. *Good Governance* tidak dapat diaplikasikan dengan baik dalam suatu lingkup masyarakat tanpa adanya kesiapan organisasi, kesiapan sumber daya manusia serta kesiapan sarana dan prasarana yang memadai. Apabila ketiga konsep tersebut sudah ada dan dianggap memadai maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta dana desa dapat terkelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya.
2. Pembangunan infrastruktur desa lebih ditingkatkan pembangunannya agar dampak positif dari pembangunan tersebut betul-betul bisa dirasakan oleh

masyarakat desa, kemudian dari segi pemberdayaan masyarakat desa pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat itu diadakan seperti pembinaan masyarakat untuk melakukan budaya bersih, masalah transparansi dana juga harusnya lebih ditingkatkan agar tidak ada lagi suara-suara sumbang dari masyarakat yang mengatakan bahwa transparansi keuangan desa itu kurang, begitu juga dengan pembagian bantuan-bantuan aparat pemerintah desa harusnya bisa memperhatikan skala prioritas yang seharusnya yang mendapatkan bantuan itu betul-betul orang yang layak agar kesejahteraan itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-karim

Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2013

Bungin, Burhan *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Darsono, *BUDAYA ORGANISASI Kajian Tentang Organisasi, Budaya, Ekonomi, Sosial dan Politik*. (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010)

Data Desa Suamarrang

Erwan, Pramusinto, Agus dan Agus Purwanto, *Reformasi Birokrasi, Kepemeimpinan dan Pelayanan Publik*, yogyakarta: Gava Media, 2009

Handayani, Risma *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Makassar: Alauddin University Press, 2014

Hendra S. *Sahih Bukhari dan Muslim*. Bandung: Jabal, 2008

Karim, Abdul Gaffar *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006

Ramli, Muhammad *Dinamika Birokrasi pada Era Reformasi*, Makassar: Alauddin University Press, 2012

Ruslan, Rosady *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Sabarguna, Boy S. *Pengembangan Posyandu, Peningkatan Pendapatan, Pengolahan Sampah juga Seni dan Pariwisata dalam rangka PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA*, Jakarta: Segung Seto, 2009

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014

Syamsuddin, dkk, *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal*. Ponorogo: Cv. Wade Group, 2015

- Torang, Syamsir *Organisasi & Manajemen (PERILAKU, STRUKTUR, BUDAYA & PERUBAHAN ORANISASI)*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Weber ,Max *The TheoryOf Social Economici and Organization* London: Collier Macmillan Publisher, 1947
- Wicaksono, Kristian Widya *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, graha ilmu*, Yogyakarta, 2006
- Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Cornelius Complek Caro, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Peronkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015
- Dede Ardian, “Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti”, *Skripsi* fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014
- M. Luqman Hakim, “Politik Anggaran Keuangan Desa (Studi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 2011 Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2012
- Nova Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watapute Kabupaten Muna”, *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo*, 2016
- Sudarni, “Politik Anggaran dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, *Skripsi* Sarjana Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2014

http://www.djpk.depkeu.go.id/Penggunaan-Dana-Desa_Kemendes.pdf. Diakses pada Jum'at, 17 Maret 2017. Pukul 16:16.

[http://www.googlr.com/search?client=firefoxb&q=jurnal+pengelolaan+alokasi+dana+desa+\(add\)+di+desa-desa+kecamatan+rogojomp](http://www.googlr.com/search?client=firefoxb&q=jurnal+pengelolaan+alokasi+dana+desa+(add)+di+desa-desa+kecamatan+rogojomp)

Menteri dalam negeri republic Indonesia peraturan menteri dalam negeri republic Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa. Diakses pada tanggal 20-07-2017 pukul 11.24

Jurnal

Linda Muchacha Paramitha dkk, "Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.4, h.92

Hasil wawancara dengan Ahmad Syarif selaku pemuda Desa Sumarrang pada tanggal 30 Mei 2017

Hasil wawancara dengan Arsyad selaku pemuda Desa Sumarrang pada tanggal 30 Mei 2017

Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Majid selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Sumarrang pada tanggal 23 Mei 2017, diakses pada tanggal 19-07-2017 pukul 08.28 WITA

Hasil wawancara dengan Bapak Asmauddin selaku Kaur Umum Desa Sumarrang pada tanggal 23 Mei 2017

Hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku Kasi Pemerintahan Desa Sumarrang pada tanggal 23 Mei 2017

Hasil wawancara dengan Bapak Sukurli Maudani selaku Ketua BPD Desa Sumarrang pada tanggal 23 Mei 2017

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Lina selaku Ketua Kelompok Tani Bina Remaja pada tanggal 21 Mei 2017

Hasil wawancara dengan Ibu St. Hardianti selaku Sekretaris Desa Sumarrang pada tanggal 23 Mei 2017

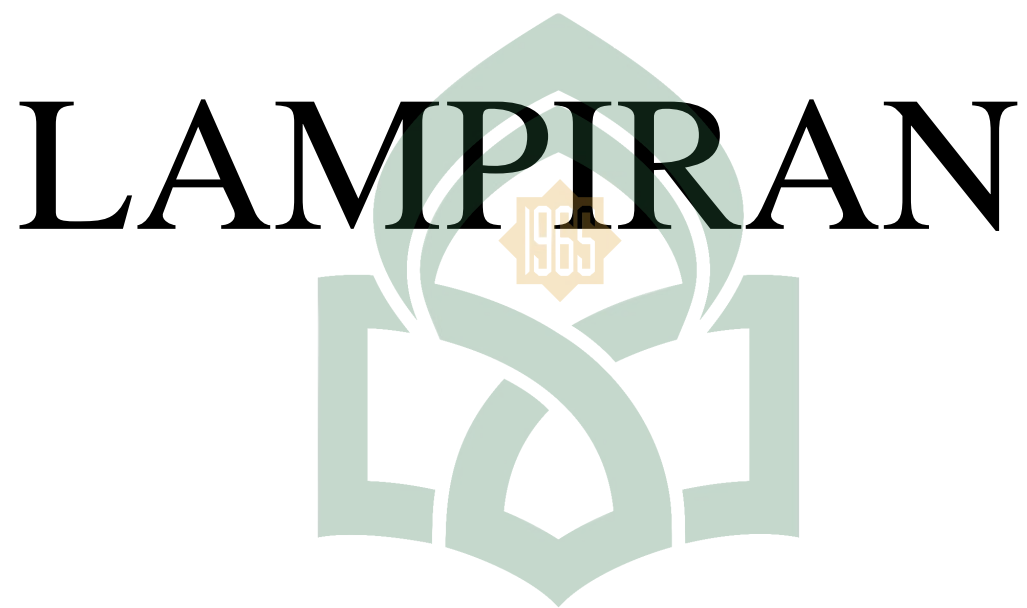
Hasil wawancara dengan Maslan Mahmud selaku pemuda Desa Sumarrang pada tanggal 30 Mei 2017

Hasil wawancara dengan Rasamia selaku masyarakat Dusun Pessunan Desa Sumarrang pada tanggal 31 Mei 2017

Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Kepala Desa Sumarrang pada tanggal 22 Mei 2017

Hasil wawancara dengan Bapak Kurniadi Ahmad selaku Sekretaris Desa Sumarrang pada tanggal 22 Mei 2017





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DOKUMENTASI



(Foto bersama Kepala Desa dan aparat pemerintah desa sumarrang Tanggal 23 Mei 2017)



(Foto bersama Kaur Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tanggal 23 Mei 2017)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



(Foto bersama Bendahara Desa Sumarrang Pada Tanggal 23 Mei 2017)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Wahyuni, lahir di Sumarang pada tanggal 31 Desember 1994. Anak pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan suami-istri, Mukhtar dan Hasnah. Jenjang pendidikan yang ditempuh mulai dari tingkat kanak-kanak di TK Bina Remaja, Desa Sumarang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar tahun 2000, kemudian tingkat sekolah dasar di SDN 032 Inp. Sumarang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar 2001-2007, dilanjutkan ke tingkat menengah pertama di SMP Negeri 4 Campalagian Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar tahun 2008-2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Camapalagian Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2011-2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi di UIN Alauddin Makassar mengambil jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik dengan penyelesaian studi selama 3 tahun 11 bulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R